

# SIARAN PERS

## MK Masih Menanti Keterangan Ahli dalam Uji UU Hak Cipta

**Jakarta, 27 September 2022**— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang sebelumnya ditunda akan digelar pada Selasa (27/9), pukul 11.00 WIB ini memiliki agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait.

Permohonan perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT Musica Studio terkait norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, Pasal 63 ayat (1) huruf b. Pemohon pada intinya mendalilkan pasal yang diuji menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus serta dengan dikembalikannya hak cipta kepada pencipta, maka Pemohon tidak dapat mengambil royalti atas eksploitasi yang dilakukan pihak lain atas fonogram dari sebuah karya tersebut.

Terhadap permohonan ini, pada sidang sebelumnya (14/3/2021), Anggota DPR Supriansa menjelaskan awal mula hak cipta merupakan hak privat yang diatur oleh negara dengan memberikan perlindungan dan stimulus bagi para pemilik hak cipta. Kemudian, pada sidang yang sama, Min Usiher Ginting selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial mewakili Presiden menyampaikan keterangan bahwa hak moral diberikan kepada seorang pencipta. Penciptalah yang memiliki kontrol melalui penggunaan karyanya.

Satrio Yudi Wahono alias Piyu PADI melalui kuasa hukum pada sidang Selasa (22/3) lalu menyatakan UU Hak Cipta termasuk Pasal 18 yang mengatur mengenai jangka waktu pengembalian hak cipta—merupakan bentuk perlindungan Pemerintah kepada pencipta dan pelaku pertunjukan sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Sementara itu, keterangan berbeda disampaikan oleh Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo). Leo Famli yang mewakili Asprindo menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta melarang pihak lain untuk mengeksploitasi fonogram tanpa seizin dari karena terdapat hak untuk mengeksploitasi fonogram sejak tercipta hingga 50 tahun dan tanpa batas waktu. Akan tetapi, lanjutnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan hak Asprindo yang dilindungi dalam UU tersebut menjadi terlanggar dan terampas.

Pada sidang Rabu (13/4) lalu, Panji Prasetyo selaku kuasa hukum para Pihak Terkait yakni Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugerah Dangdut Indonesia (ADI), dan Perkumpulan Royalti Anugerah Indonesia (RAI) hak moral dan hak-hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada penciptanya.

Terakhir, Marcell Siahaan yang berprofesi sebagai penyanyi menerangkan hak cipta pada prinsipnya tidak dapat dimiliki secara mutlak dan tanpa jangka waktu sehingga konsep kepemilikannya secara mutlak menjadi tidak relevan. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara.

Ahli yang dihadirkan Indra Lesmana dan Ikang Fawzi (Pihak Terkait), Ahmad M. Ramli pada sidang Senin (8/8) lalu, mengatakan hak cipta bersifat tidak berwujud dan melekat kepada kreativitas penciptanya secara eksklusif. Khusus untuk hak cipta lagu atau buku, Ahmad menjelaskan bahwa hak cipta tidak semata-mata sebagai objek tidak berwujud, tetapi sebagai objek yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya yang bisa digunakan secara bersama-sama dan pada waktu yang sama oleh banyak. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)